

**AKHIR ERA MESSI**

Lionel Messi melambaikan tangan kepada pendukung Argentina saat pemanasan menjelang laga persahabatan melawan Benin di Stadion Mas Monumental, Buenos Aires, Selasa (6/10/2026) setepat. Laga tersebut menjadi penampilan terakhir Messi bersama Timnas Argentina setelah perjalanan panjang yang mengantarkannya meraih Piala Dunia 2022 dan dua gelar Copa America. (ist.afp)

HAJI 2027: RP54,6 JUTA DARI KANTONG JEMAAH

BPIH Naik Rp11 Juta dari 2026, Setoran Jemaah Hanya Bertambah Rp455 Ribu

BIAYA & KUOTA**HAJI INDONESIA 2023-2027****2023**

- BPIH : Rp90,05 juta
- Bipih : Rp49,81 juta
- Nilai manfaat : Rp40,24 juta
- Kuota : 229.000 jemaah

Pemerintah dan DPR menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp98,47 juta per jemaah, naik sekitar Rp11,06 juta dari tahun sebelumnya. Namun, kenaikan total biaya itu tidak sepenuhnya dibebankan kepada jemaah karena porsi pembiayaan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji diperbesar menjadi 44,50 persen. Besaran Bipih yang menjadi tanggungan langsung jemaah ditetapkan Rp54,65 juta, hanya naik sekitar Rp455 ribu dibandingkan 2026. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan subsidi Rp3 juta per jemaah. Sementara itu, sisa nilai manfaat sekitar Rp2,6 triliun akan dialokasikan ke rekening virtual jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu. Dalam penyelenggaraan haji 2027, Indonesia juga akan menggunakan Paket C sebagai standar layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) setelah Arab Saudi menghapus Paket D. Skema baru ini menawarkan fasilitas yang lebih baik, termasuk tenda lebih luas dan pendingin ruangan. Sementara pemerintah Saudi telah memulai persiapan musim haji 1448 H melalui koordinasi dengan kantor urusan haji dari 78 negara. **BERSAMBUNG HAL.11**

2024

- BPIH : Rp93,41 juta
- Bipih : Rp56,05 juta
- Nilai manfaat : Rp37,36 juta
- Kuota : 241.000 jemaah

2025

- BPIH : Rp89,41 juta
- Bipih : Rp55,43 juta
- Nilai manfaat : Rp33,98 juta
- Kuota : 221.000 jemaah

2026

- BPIH : Rp87,41 juta
- Bipih : Rp54,19 juta
- Nilai manfaat : Rp33,22 juta
- Kuota : 221.000 jemaah

2027

- BPIH : Rp98,47 juta
- Bipih : Rp54,65 juta
- Nilai manfaat : Rp43,82 juta
- Kuota : 221.000 jemaah*

*Ada subsidi Rp3 juta; beban pelunasan riil sekitar Rp23,25 juta.

PRABOWO KUMPULKAN 800 PATI TNI-POLRI, TEKANKAN INTEGRITAS DAN LARANGAN EGO SEKTORAL

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sekitar 800 perwira tinggi TNI dan Polri dari seluruh Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Di hadapan para jenderal, laksamana, marsekal, dan perwira tinggi kepolisian itu, Prabowo menekankan pentingnya kekompakan, integritas, kesiapsiagaan, serta larangan mengedepankan ego sektoral dalam menjalankan tugas.

Pertemuan tersebut dikemas dalam agenda taklimat Presiden. Prabowo mengatakan pertemuan itu sengaja digelar menjelang dua tahun pemerintahannya untuk menyamakan pemahaman mengenai kondisi bangsa dan negara. "Sengaja saya meng-undang para perwira tinggi menjelang pemerintahan yang saya pimpin dua tahun. Saya ingin memberi suatu gambaran keadaan yang kita hadapi sebagai bangsa dan sebagai negara," ujar Prabowo.

Acara berlangsung di Lapangan Tengah Kompleks Istana Kepresidenan dan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kemudian menyampaikan laporan kegiatan. Panglima TNI menyebut pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan visi sekaligus memperkuat soliditas dan sinergi TNI dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo memberikan sejumlah pesan kepada para perwira tinggi. Presiden meminta TNI dan Polri memperkuat kekompakan dan kesiapsiagaan operasional, menjaga integritas, serta tidak mengedepankan kepentingan masing-masing institusi.

"Beberapa taklimat Bapak Presiden kepada para peserta antara lain perkuat kekompakan dan kesiapsiagaan operasional TNI-Polri. Jaga integritas dan jangan ada ego sektoral. Seluruhnya semata-mata untuk kemudahan dan kesejahteraan rakyat," kata Teddy.

Bagi Prabowo, kekompakan TNI-Polri tidak berhenti pada hubungan antar-institusi. Ia mengingatkan bahwa kedua lembaga tersebut bekerja dengan mandat yang bersumber dari masyarakat. "Jaga kepercayaan rakyat, TNI adalah tentara rakyat dan Polri adalah polisi masyarakat. Perbaiki layanan kepada warga dan selalu menjadi yang tercepat dalam membantu warga di setiap situasi," kata Prabowo, sebagaimana disampaikan kembali Teddy.

Prabowo juga meminta para perwira menjadi teladan dalam menjalankan tugas. Menurut dia, pangkat dan kehormatan yang diberikan negara bukan sekadar simbol kedudukan, melainkan membawa tanggung jawab besar.

"Terus menjadi contoh dalam setiap tugas, dari perwira di atas sampai prajurit di bawah," ujar Teddy mengutip arahan Presiden.



Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat kepada 800 perwira tinggi TNI dan Polri seluruh Indonesia, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/9/2026). (BPPI Setpres)

Para perwira juga diminta memiliki keberanian menghadapi berbagai tantangan dan menempatkan kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan lainnya.

Pesan tersebut disampaikan ketika lingkungan strategis yang dihadapi Indonesia semakin kompleks. Dalam laporan Panglima TNI, tantangan itu mencakup ancaman siber, informasi, hingga perang hibrida. Agus mengatakan arahan Presiden akan menjadi pedoman penting bagi TNI dalam menentukan langkah dan kebijakan sekaligus memperkuat kesiapan sebagai alat negara di bidang pertahanan.

Menteri Koordinator Bidang

Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengungkapkan arahan Prabowo juga menyentuh persoalan profesionalisme sumber daya manusia TNI dan Polri. Menurut Dudung, Presiden meminta kedua institusi menyiapkan sistem rekrutmen yang lebih profesional untuk menghadapi potensi perang hibrida.

"kemudian harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual," kata Dudung se usai mengikuti taklimat.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak juga mengatakan Prabowo meminta TNI dan Polri bekerja lebih baik dan tidak

mengulangi berbagai pelanggaran yang pernah terjadi. "Ya supaya bekerja baik saja, mengingatkan kembali supaya kita bekerja lebih baik lagi, itu saja," kata Maruli. Ia menyebut Presiden juga menyinggung masih adanya sejumlah aturan yang selama ini dilanggar.

Pertemuan 800 perwira tinggi ini berlangsung hanya dua hari setelah Prabowo memimpin upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10). Dalam momentum tersebut, Prabowo menekankan posisi TNI sebagai tentara rakyat serta pentingnya kesiapan menghadapi berbagai ancaman di tengah situasi dunia yang penuh gejolak dan ketidakpastian.

Agenda taklimat itu juga digelar beberapa hari setelah pergantian pucuk pimpinan Polri. Pada 1 Oktober 2026, Prabowo melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri. Suyudi menyatakan langkah awal kepemimpinannya adalah melakukan konsolidasi internal dan mengevaluasi program yang telah berjalan. Program yang dinilai baik akan diteruskan, sementara bagian yang masih perlu diperbaiki akan dibenahi. (gus,rla,ant/dya)

Rekrutmen: Calon Berkacamata Bakal Bisa Masuk

Presiden Prabowo Subianto meminta sistem rekrutmen TNI dan Polri ke depan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual dinilai perlu menjadi bagian penting dalam memilih calon prajurit dan anggota kepolisian.

Arahan itu disampaikan Prabowo dalam taklimat kepada 800 perwira tinggi TNI dan Polri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengungkapkan salah satu penekanan Presiden tersebut se usai pertemuan.

"Kemudian harus menyiapkan

juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual," kata Dudung.

Dudung kemudian memberikan contoh bahwa calon anggota TNI atau Polri yang menggunakan kacamata tetap dapat diberi kesempatan mengikuti rekrutmen, selama memiliki kemampuan intelektual yang baik.

"Jadi, kalau misalnya masuk tentara, polisi pakai kacamata juga boleh, tetapi dia pintar," ujar Dudung.

Menurut Dudung, arahan tersebut berkaitan dengan perubahan karakter ancaman pertahanan dan keamanan. Perang

pada masa mendatang, kata dia, tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga berkembang ke perang hibrida dan penggunaan teknologi seperti drone.

"Karena tantangan ke depan ini kan perang itu perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden," katanya.

Karena itu, Prabowo juga meminta profesionalisme personel TNI dan Polri ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan. Dudung mengatakan penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi penting untuk menghadapi dinamika keamanan global yang terus berubah. (tin,ist/dya)

Usai Putusan MK soal Ijazah SMA Gibran

DPR BUKA OPSI PANSUS HINGGA ANGKET

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka peluang tindak lanjut politik di DPR. parlemen secara politis dapat menggunakan mekanisme panitia khusus (pansus) maupun hak angket untuk menindaklanjuti temuan I terkait dokumen pendidikan Gibran saat pencalonan Pilpres 2024.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan DPR juga perlu melihat lebih jauh implikasi putusan MK terhadap proses pencalonan Gibran.

"Juga secara politis sangat mungkin bagi DPR untuk menindak lanjuti Putusan MK ini melalui mekanisme yg tersedia, seperti pansus dan atau angket," kata Politikus PDIP itu, Rabu (7/10/2026).

Menurut Deddy, bagian paling penting dari putusan tersebut ialah MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

"Menurut saya yang paling penting dari Putusan itu adalah fakta bahwa MK tidak menemukan bukti bahwa Gibran punya ijazah SMA atau yg setara. Itu berarti dia sejak awal tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden," ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut patut diduga membuat dokumen yang digunakan sebagai syarat administrasi pencalonan cacat secara hukum.

Deddy selanjutnya mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. Menurut dia, karena Gibran sudah terpilih dan dilantik, dugaan pelanggaran terhadap syarat pencalonan perlu dilihat apakah memiliki konsekuensi hukum maupun politik terhadap kedudukannya. "Jadi dimungkinkan mereka yang punya legal standing untuk melakukan gugatan hukum terhadap para pihak terkait dengan kemungkinan rekayasa syarat pencalonan," katanya.

Fraksi PDIP di DPR sebelumnya menyatakan menghormati putusan MK dan menempatkannya sesuai kewenangan konstitusional lembaga tersebut.

Sorotan berikutnya mengarah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara yang menerima dokumen pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. MK dalam pertimbangannya menyoroti bahwa dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Keterangan (Suket) Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak menunjukkan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen tersebut antara



Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka saat meninjau pameran Inacraft di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026). (Dok. Sekretariat Wakil Presiden)

lain berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grade. MK menyebut certificate of attendance hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti kelulusan.

MK juga menyatakan Suket tersebut secara prosedural memenuhi ketentuan Permendikbud, tetapi substansinya merupakan penyetaraan pengetahuan setara SMK, bukan

penyetaraan surat tanda tamat belajar SMA atau sederajat di luar negeri.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan lembaganya menghormati Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, baik amar maupun seluruh pertimbangan hukumnya. KPU juga menyatakan akan memberikan penjelasan mengenai administrasi pencalonan Gibran berdasarkan arsip dan dokumen yang

tersedia.

"KPU tetap berkomitmen memberikan penjelasan mengenai administrasi pencalonan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan arsip dan dokumen yang tersedia," kata Afifuddin.

KPU menjelaskan surat keterangan penyetaraan yang diterima pada 2024 diterbitkan lembaga berwenang dan belum pernah dibatalkan. Komisioner KPU Idham Holik menambahkan putusan MK akan menjadi rujukan dalam penyusunan rancangan PKPU dan kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu, termasuk pembahasan RUU Pemilu bersama DPR dan pemerintah.

Gibran sendiri memilih menghormati putusan MK dan melanjutkan tugasnya sebagai wakil presiden. "Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyelesaikan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," kata Gibran saat membuka pameran INACRAFT di Jakarta, Rabu (7/10)..(tin,ant,ist/dya)

Semalam, Jokowi Ternyata Bertemu Prabowo 2 Jam

PRESIDEN ke-7 Joko Widodo atau Jokowi ternyata bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026) malam. Pertemuan berlangsung sekitar dua jam, mulai pukul 19.00 hingga sekitar 21.00 WIB. Namun, hingga Rabu (7/10), belum ada penjelasan mengenai agenda atau isi pembicaraan keduanya.

Ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, membenarkan pertemuan tersebut. Menurut dia, Prabowo yang mengundang Jokowi untuk datang ke Kertanegara. "Pak Prabowo mengundang Pak Jokowi ke Kertanegara. Pertemuan dimulai pada pukul 19.00 hingga sekitar pukul 21.00-an," kata Syarif saat dikonfirmasi, Rabu (7/10).

Pertemuan tersebut menarik perhatian karena berlangsung pada malam yang sama ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara syarat pendidikan pencalonan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MK menyatakan permohonan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Namun, Syarif membantah pertemuan Jokowi-Prabowo berkaitan dengan perkara tersebut. Ketika ditanya apakah gugatan syarat pendidikan Gibran dibahas, ia menjawab singkat, "Tidak ada."

Syarif tidak memerinci agenda lain yang dibicarakan Jokowi dan Prabowo. Ia juga tidak menjelaskan alasan Prabowo mengundang Jokowi dalam pertemuan tertutup tersebut. Dengan demikian, informasi yang terkonfirmasi sejauh ini hanya waktu, tempat, dan pihak yang menginisiasi pertemuan, sementara substansi pembicaraan belum disampaikan ke publik.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga mengaku tidak mengetahui isi pertemuan. Dasco mengatakan dirinya tidak hadir dalam pertemuan Jokowi dan Prabowo

sehingga tidak dapat memastikan apa yang dibahas. "Pertemuan yang semalam berlangsung saya juga enggak hadir. Sehingga isi dari pertemuannya juga saya belum tahu," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Pertemuan ini juga berlangsung ketika perhatian publik tertuju pada posisi Gibran setelah putusan MK. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Meski demikian, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden karena perkara dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar kedudukan hukum pemohon.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Prabowo maupun Jokowi mengenai topik yang dibicarakan selama dua jam di Kertanegara. (tin,dtc,ist/dya)

Pengembangan Kasus Maidi Mengarah ke TPPU

KPK SITA DOKUMEN DAN UANG DARI DINKES MADIUN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai setelah menggeledah kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Madiun, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan perkara yang berkaitan dengan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan seluruh barang yang disita masih akan diperiksa penyidik untuk mengetahui keterkaitannya dengan perkara. Dokumen dan barang bukti elektronik akan ditelaah lebih lanjut, sementara nominal uang tunai yang diamankan masih dihitung.

"Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik mengamankan barang bukti sejumlah dokumen, beberapa barang bukti elektronik, dan juga uang tunai," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/10).

Budi menegaskan penggeledahan tersebut belum berkaitan dengan penetapan tersangka baru. Penyidik masih berada pada tahap penyidikan umum dan membutuhkan tambahan



Penyidik menggeledah Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Madiun terkait kasus Maidi, Rabu (7/9/2026). (ist)

alat bukti untuk mengembangkan perkara.

"Untuk melengkapi alat bukti yang dibutuhkan karena memang pengembangan penyidikan ini masih tahap penyidikan umum, atau belum ada penetapan tersangka," ujar dia.

Penggeledahan di Dinkes PPKB merupakan bagian dari rangkaian pencarian alat bukti yang dilakukan KPK di sejumlah lokasi di Kota Madiun.

Sebelumnya, penyidik menggeledah beberapa rumah dan kantor pemerintahan, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun.

Rangkaian penggeledahan itu dilakukan setelah KPK membuka penyidikan baru pada September 2026 untuk mengembangkan perkara Maidi. Penyidikan tersebut berkaitan

dengan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, sehingga hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengembangan tersebut.

Kasus Maidi bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 19 Januari 2026. Sehari setelah OTT, KPK menetapkan Maidi, orang kepercayaannya Rochim Ruhdiyanto, dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah sebagai tersangka. KPK membagi perkara awal menjadi dua klaster, yakni dugaan pemerasan terkait imbalan proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), serta dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Dalam perkara awal, Maidi dan Rochim didakwa dalam klaster pemerasan, sedangkan Maidi bersama Thariq didakwa dalam perkara gratifikasi. Perkara tersebut kemudian bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. (wid,ist,ant/dya)

KEMENKUM TEGASKAN HAK CIPTA SOUND HOREG TAK PERNAH TERBIT

Polemik hak cipta sound horeg bukan perkara pencabutan sertifikat. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Kementerian Hukum tidak pernah menerbitkan sertifikat hak cipta untuk sound horeg karena pengajuannya sejak awal tidak diproses hingga penerbitan.

Penegasan itu disampaikan Supratman saat ditemui di sela acara Copyright Royalty Governance in The Digital Era 2026 di Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, Bali, Rabu (7/10/2026).

"Sound horeg bukan soal dicabut atau tidak. Itu pernah mau mengajukan hak cipta di Kementerian Hukum lewat Kanwil Jawa Timur. Tapi tidak diproses," kata Supratman.

Dengan demikian, tidak tepat jika status hak cipta sound horeg disebut pernah diterbitkan kemudian dicabut. Supratman kembali menegaskan sertifikat hak cipta untuk sound horeg memang tidak pernah dikeluarkan Kementerian Hukum.

"Enggak, karena memang tidak jadi. Hak ciptanya nggak pernah diterbitkan," ujarnya.

Menurut Supratman, persoalan tersebut perlu dibedakan antara aspek kreativitas sebuah karya dan dampak penggunaannya di tengah masyarakat. Keberadaan unsur kreativitas dalam sound horeg tidak serta-merta berarti seluruh bentuk penggunaannya memperoleh perlindungan atau pembenaran ketika praktik penggunaannya menimbulkan gangguan terhadap ketertiban atau merugikan masyarakat.

Pernyataan itu muncul di tengah perdebatan mengenai penggunaan sound horeg dengan perangkat suara berdaya besar yang dalam sejumlah kasus mendapat sorotan karena dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Karena itu, isu hak cipta tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membenarkan setiap bentuk penggunaan sound horeg.

Di luar polemik sound horeg, Supratman dalam forum tersebut juga menyoroti tantangan pengelolaan royalti hak cipta di era digital. Menurut dia, Kementerian Hukum mendorong pembentukan aturan main dan sistem bersama, baik di tingkat nasional

maupun global.

"Agar royalti hak cipta yang semakin cepat mengalir melintasi batas negara, ini dapat dicatat, dihitung, dan dibagikan dengan lebih transparan, akuntabel, dan adil," kata Supratman.

Dia mengatakan persoalan royalti lintas negara tidak hanya menyangkut aturan hak cipta. Koordinasi antar-lembaga serta keterhubungan sistem informasi juga menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan royalti berjalan dengan baik.

Indonesia, kata Supratman, mendorong dialog internasional yang berlangsung selama tiga hari untuk mempertemukan pengalaman dan praktik dari berbagai negara. Forum tersebut tetap mempertimbangkan sistem hukum internasional dan ketentuan hukum masing-masing negara.



Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas

"Forum ini menjadi ruang untuk membangun pemahaman bersama dan menjajaki kerja sama praktis. Tujuannya, memastikan pencipta dan pemegang hak dapat memperoleh manfaat ekonomi secara lebih adil dari pemanfaatan karya di lingkungan digital," ujar Supratman. (gus,rls,ant/dya)

Telusuri Aliran Uang Kasus HGB Summarecon MENTERI NUSRON MANGKIR DARI PEMERIKSAAN KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mendapatkan keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam penyidikan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nusron sedianya diperiksa sebagai saksi pada Rabu, 7 Oktober 2026, tetapi tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di kementeriannya. KPK memastikan pemeriksaan akan dijadwalkan ulang karena keterangan Nusron dinilai penting untuk mengurai konstruksi perkara, termasuk kemungkinan adanya pihak lain dan aliran uang di lingkungan ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat kepada penyidik untuk mengonfirmasi ketidakhadirannya. "Yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Penyidik, kata dia, akan berkoordinasi dengan Nusron untuk menentukan jadwal pemeriksaan berikutnya. KPK berharap mantan politikus Partai Golkar itu memenuhi panggilan selanjutnya.

Pemanggilan Nusron menjadi penting karena perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan pemberian uang untuk mengurus HGB Summarecon. Budi mengatakan penyidik masih mendalami alur perintah dan aliran uang dari perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026.

"Keterangan-keterangan dari NW (Nusron Wahid) ini dibutuhkan oleh penyidik guna menerangkan bagaimana konstruksi utuh dari perkara ini," kata Budi.

Penyidik juga ingin menilai apakah masih ada pihak lain yang mempunyai peran signifikan di luar delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami berharap dan mengimbau agar pada penjadwalan ulang berikutnya NW bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik karena pada prinsipnya setiap keterangan dari saksi ataupun pihak-pihak lain adalah untuk membantu penyidik guna mengungkap perkara ini menjadi terang benderang," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Budi menyampaikan, penyidik akan berkoordinasi dengan Nusron untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan. Keterangan Nusron, menurut Budi, dibutuhkan penyidik untuk menerangkan konstruksi utuh perkara ini.



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid

Perkara tersebut bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. Menurut konstruksi KPK, sebagian tanah itu masih bermasalah karena disengketakan sejumlah ahli waris yang sebelumnya memegang SHM. Para ahli waris kemudian menggugat penerbitan sembilan SHGB Summarecon ke PTUN Bandung.

Setelah itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor melakukan mediasi. Para ahli waris mengajukan blokir terhadap SHGB tersebut, sementara gugatan di PTUN Bandung kemudian dicabut.

Persoalan kemudian bergeser dari sengketa pertanahan menjadi dugaan transaksi untuk membuka blokir. KPK menyebut Yaser Alfarisi, yang disebut sebagai perantara pihak Summarecon, berkomunikasi dengan Erwin, pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron. Yaser menyampaikan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung tidak bersedia membuka blokir dan memproses pemecahan HGB tanpa arahan atasannya. Yaser bersama Rizal Pahlevi kemudian meminta bantuan Erwin untuk berkomunikasi dengan Sontang.

Pada awal Agustus 2026, KPK menduga muncul permintaan fee untuk membuka blokir dan

menerbitkan sertifikat tanah Summarecon. Sontang, melalui Erwin, disebut meminta uang dengan kode "dua" yang diduga berarti Rp2 miliar. Pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi Rp1,5 miliar karena diduga masih ada pihak lain yang akan memperoleh fee broker. Pada 27 Agustus 2026, Direktur Utama Summarecon Adianto Pitojo Adhi melalui Yaser dan Rizal diduga menyerahkan Rp1,5 miliar kepada Erwin. Dari uang tersebut, Erwin diduga menyerahkan Rp200 juta kepada Sontang di sebuah kafe di Jakarta Selatan sebagai fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB.

KPK kemudian melakukan OTT di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon. Empat tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafik, serta Erwin dan Muhammad Fakhry. KPK menyebut empat nama terakhir sebagai orang yang diduga merupakan

FAKTA KUNCI KASUS YANG SERET NUSRON WAHID

- **Pusaran Kasus:**
Dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
- **Awal Mula:**
Berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026.
- **Status Nusron:**
Diperiksa KPK sebagai saksi pada Rabu, 7 Oktober 2026. Tak hadir.
- **4 Ring 1 Tersangka:**
4 dari 8 tersangka merupakan orang kepercayaan Nusron (termasuk Fahd El Fouz dan Arif Sugiyanto).
- **Nilai Suap:**
Pihak Summarecon diduga menyetor Rp1,5 Miliar (dari permintaan awal Rp2 Miliar) untuk buka blokir lahan.
- **Sitaan Fantastis:**
KPK menyita total Rp106,3 Miliar uang tunai dari berbagai lokasi geledeh.

orang kepercayaan Nusron.

Dari OTT tersebut, KPK menyita uang dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar. Jumlah itu disebut KPK termasuk yang terbesar dalam sejarah OTT lembaga antirasuah. Sebagian besar uang ditemukan di rumah Arif Sugiyanto. Barang bukti tersebut terdiri atas Rp31,86 miliar, US\$2.611.500, S\$1.974.500, 910 riyal Arab Saudi, dan 981 ringgit Malaysia. KPK juga menyita Rp896 juta dari Rizal Pahlevi, Rp8 juta dari Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, serta Rp49,5 juta dari Sontang Coin Manurung.

Keberadaan uang dalam jumlah besar di rumah Arif membuat penyidikan berkembang. KPK menduga Arif bukan sekadar terkait perkara Summarecon, melainkan berperan sebagai pengepul setoran dari pengurusan layanan pertanahan. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut penyidik menemukan catatan uang masuk dan keluar dari Arif. "Dia diduga berperan sebagai pengepul uang dari Erwin ataupun Muhammad Fakhry," kata Taufik. Pengacara Arif, Muhammad Fadli Nasution, mengatakan kliennya diperiksa mengenai pengantaran uang ke Mukhtar Nahdlatul Ulama, tetapi belum menjelaskan hubungan Arif dengan Nusron. (tin,rls,ant/dya)

Rusunawa Muharto Diajukan jadi Milik Pemkot Malang

MALANG - Rumah susun sederhana sewa (Rusunewa) Muharto, Kota Malang, selama puluhan tahun belum tersentuh penanganan melalui anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Kondisi tersebut terjadi karena statusnya sebagai Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Diketahui, lahannya merupakan aset Pemkot Malang.

Kini, Pemkot Malang akan mengajukan agar status bangunan berubah menjadi Barang Milik Daerah (BMD). Sehingga pengelolaan dan rehabilitasi dapat dilakukan pemerintah daerah.

"Lahannya itu aset kami, tapi bangunannya masih (aset) pusat, belum diserahkan ke kami, masih Barang Milik Negara (BMN) ada di Kementerian PU," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, ditemui pada Rabu (7/10/2026).

Menurutnya, selama bangunan masih tercatat sebagai BMN, Pemkot Malang tidak dapat melakukan berbagai tindakan terhadap bangunan tersebut, termasuk rehabilitasi.

"Sehingga kami tidak bisa mengelola, merehabilitasi, atau melakukan apapun di bangunan tersebut," katanya.

Karena itu, Wahyu menyebut Pemkot Malang akan segera bersurat kepada pemerintah pusat untuk mendorong penyerahan aset bangunan Rusunawa Muharto kepada Pemkot.

Rusunawa Muharto diketahui merupakan bagian dari Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kementerian PUPR saat itu. Bangunan tersebut telah berstatus sebagai BMN selama sekitar 29 tahun, sementara lahan tempat bangunan berdiri merupakan aset Pemkot Malang.

Persoalan status aset ini juga menjadi perhatian di tengah munculnya isu mengenai aktivitas transaksi sewa hingga jual beli di lingkungan Rusunawa Muharto. Dengan nilai mencapai jutaan rupiah per tahun hingga dugaan jual beli petak.

Wahyu mengatakan, Pemkot Malang belum dapat memastikan informasi tersebut. Sebab,

pengelolaan bangunan yang berstatus BMN berada di bawah Kementerian PU. "Makanya, karena BMN, kami tidak bisa masuk ke situ. Tetapi kalau memang ada data-data tersebut, nanti kami akan lakukan pengecekan, kami akan laporan ke Kementerian PU," katanya.

Pemkot Malang juga akan melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai pengelolaan Rusunawa Muharto selama ini. Wahyu mengaku telah meminta Pj Sekretaris Daerah Kota Malang untuk segera mengecek persoalan tersebut, termasuk informasi terkait isu transaksi yang disebut terjadi di lingkungan rusun.

Di tengah belum adanya kewenangan Pemkot untuk melakukan



penanganan terhadap bangunan, warga Rusunawa Muharto selama ini melakukan perawatan secara swadaya.

Salah satunya disampaikan Pujiono, warga Blok B yang telah tinggal di Rusunawa Muharto sejak 1999. Ia mengatakan, selama tinggal di rusun tersebut, dirinya tidak membayar biaya sewa tahunan. (Santi/Dya)

Komisi B DPRD Kota Batu Awasi Dampak Lingkungan Proyek Geothermal hingga Wisata Jalibar



Desa Sumberbrantas, serta pengembangan objek wisata di kawasan Jalur Lingkar Barat (Jalibar).

"Pengawasan terhadap ketiga proyek tersebut diperlukan untuk memastikan kegiatan investasi dan pariwisata berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan maupun kepentingan masyarakat setempat," ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Asmadi, dikutip pada Rabu (7/10/2026).

Terkait wacana pembangunan geothermal, Ketua DPRD Kota Batu periode 2019-2024 ini mengingatkan pemerintah pusat maupun pihak pengembang agar tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu, DPRD, dan masyarakat terdampak.

Menurutnya, rencana pemanfaatan energi panas bumi perlu dikaji secara

matang, terutama menyangkut potensi risiko ekologis, ancaman bencana seperti banjir bandang, serta keberlanjutan pasokan mata air yang menjadi salah satu sumber daya penting bagi Kota Batu.

Asmadi menyebut, rencana geothermal sebelumnya juga pernah memunculkan penolakan warga ketika diwacanakan di kawasan Arjuno. Kini, ketika wacana tersebut mengarah ke Songgoriti, keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dinilai menjadi hal penting untuk mencegah polemik serupa.

"Soal geothermal itu sangat sensitif dan berbahaya jika gegabah. Dulu waktu diusulkan di kawasan Arjuno, ada penolakan warga yang mengkhawatirkan dampak lingkungan dan keselamatan. Sekarang wacananya geser ke Songgoriti, penolakannya tentu tetap kuat jika tidak ada transparansi," kata Asmadi.

Ditegaskannya, pemerintah pusat dan pengembang perlu melibatkan Pemkot Batu serta masyarakat setempat sejak tahap perencanaan, termasuk

dalam pembahasan studi kelayakan. Sosialisasi juga harus dilakukan secara intensif agar masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai rencana kegiatan dan potensi dampaknya.

"Kalau masyarakat belum bisa menerima dan dampaknya merugikan kelestarian alam Kota Batu, ya tidak bisa dipaksakan," tegasnya.

Selain geothermal, Komisi B juga menyoroti aktivitas pembangunan di kawasan Jalibar yang diduga memanfaatkan aset tanah kas desa (TKD).

Asmadi mengatakan, pihaknya akan memverifikasi kembali peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terbaru untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan peruntukan ruang yang berlaku. Ia mengungkapkan, kawasan tersebut sebelumnya secara umum dikenal sebagai zona hijau. Namun, perubahan peta tata ruang yang terjadi belakangan perlu ditelusuri lebih lanjut agar tidak menimbulkan persoalan dalam pengawasan pembangunan. (Santi/Dya)

BATU - Komisi B DPRD Kota Batu menyoroti 3 proyek yang dinilai perlu mendapat pengawasan ketat terkait pemanfaatan sumber daya alam dan potensi dampak pada lingkungan.

Ketiganya meliputi wacana pembangunan energi panas bumi (geothermal) di kawasan Songgoriti, pengeboran air bawah tanah (ABT) di

Video yang diunggah Southern Giants Brigades di platform X memperlihatkan para petempur bersenjata menaiki truk militer dan terlibat baku tembak saat konvoi bergerak di jalan pesisir dekat Dhubab, Provinsi Taiz. Mereka melewati landasan pacu, gerbang tol, dan area tepi pantai yang disebut telah direbut kembali dari Houthi.(ist.rtr)



HOUTHI SERANG BANDARA ADEN, SAUDI CEGAT RUDAL DEKAT RIYADH

Pertempuran antara kelompok Houthi dan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi kembali meluas pada Rabu (7/10/2026). Houthi menyerang Bandara Internasional Aden dengan rudal balistik dan drone, sementara Arab Saudi melaporkan berhasil mencegah rudal balistik yang ditembakkan ke arah utara Riyadh. Eskalasi ini terjadi ketika pasukan pemerintah Yaman, dengan dukungan serangan udara Saudi, tengah menggempur posisi Houthi di sekitar pesisir Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb.

Kementerian Transportasi Yaman menyatakan sedikitnya dua rudal balistik dan sejumlah drone diarahkan ke landasan pacu serta terminal penumpang Bandara Aden. Salah satu rudal disebut jatuh di dekat landasan pacu hanya beberapa menit sebelum pesawat Yaman yang terbang dari Kairo, Mesir, dijadwalkan mendarat. Penerbangan itu akhirnya dibatalkan dan dialihkan ke Jeddah, Arab Saudi, sementara dua pesawat yang berada di landasan dipindahkan untuk menghindari risiko serangan lanjutan.

Serangan tersebut membuat aktivitas di bandara terganggu. Pemerintah Yaman mengancam serangan terhadap fasilitas sipil itu karena berpotensi membahayakan penumpang dan mengubah penerbangan sipil menjadi bencana kemanusiaan. Aden merupakan pintu masuk udara internasional utama bagi wilayah Yaman yang berada di luar kendali Houthi dan menjadi pusat pemerintahan yang diakui secara internasional.

Di sisi lain, koalisi militer pimpinan Arab Saudi menyatakan telah mencegah dan menghancurkan rudal balistik Houthi yang mengarah ke wilayah utara Riyadh. Juru bicara koalisi, Mayor Jenderal Turki al-Maliki, mengatakan rudal tersebut berhasil dihancurkan sebelum mencapai sasaran. Koalisi juga menyatakan telah melacak lokasi peluncuran rudal menggunakan sistem intelijen di atas Sanaa, ibu kota Yaman yang dikuasai Houthi, dan mengancam

akan menghancurkan fasilitas peluncuran tersebut.

Houthi, melalui juru bicara militernya Yahya Saree, mengklaim telah meluncurkan serangan terhadap sejumlah fasilitas di Arab Saudi. Sasaran yang disebut antara lain Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Bandara Abha, pangkalan udara di Khamis Mushait, serta fasilitas militer di Najran dan Asir. Houthi menyatakan serangan dilakukan menggunakan rudal balistik, rudal jelajah, dan drone.

Namun, sejumlah klaim tersebut belum dikonfirmasi secara independen. Reuters juga mencatat belum ada konfirmasi langsung dari otoritas Saudi mengenai klaim serangan terhadap Bandara King Khalid dan Abha.

Eskalasi ini merupakan balasan di tengah ofensif besar pasukan pemerintah Yaman yang didukung Saudi untuk merebut kembali wilayah strategis di sepanjang pesisir Laut Merah. Pasukan pemerintah mengklaim berhasil merebut sejumlah posisi di sekitar Dhubab, Bab, dan Hadeid, serta bergerak menuju Mocha. Namun, sejauh mana keberhasilan operasi tersebut masih menjadi perdebatan karena sejumlah klaim medan perang belum dapat diverifikasi secara independen.

Pertempuran paling penting kini berpusat di sekitar Selat Bab el-Mandeb, jalur laut yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Jalur tersebut menjadi semakin strategis

setelah konflik yang lebih luas di kawasan mengganggu pelayaran melalui Selat Hormuz. AP menyebut sekitar 12 persen perdagangan global melewati Bab el-Mandeb, sehingga perebutan kendali kawasan ini tidak hanya menyangkut perang saudara Yaman, tetapi juga keamanan jalur perdagangan dan energi dunia.

Saudi sebelumnya juga menghadapi serangan terhadap dua bandara di Jizan dan Najran pada Senin (5/10). Otoritas penerbangan Saudi menyatakan tiga orang mengalami luka ringan dan sejumlah fasilitas mengalami kerusakan. Pada saat yang sama, koalisi Saudi melaporkan telah mencegah rudal balistik Houthi yang diarahkan ke Khamis Mushait.

Konflik yang kembali membesar ini menandai memburuknya situasi setelah gencatan senjata yang dicapai pada 2022 berhasil menekan pertempuran besar selama beberapa tahun. Houthi menguasai Sanaa dan sebagian besar wilayah utara Yaman sejak 2014, sementara pemerintah yang diakui secara internasional mempertahankan sejumlah wilayah di selatan dengan dukungan Saudi. Riyadh menuduh Iran mempersembahkan dan mendukung Houthi, sedangkan Houthi dan Teheran membantah kelompok tersebut merupakan bagian dari jaringan proksi Iran.

Keterlibatan Saudi juga semakin

TIMELINE KONFLIK SAUDI-HOUTHI

2004-2010 | PEMBERONTAKAN SA'DAH

Houthi memberontak terhadap pemerintah Yaman di utara.

2014 | HOUTHI KUASAI SANA'A

Houthi merebut ibu kota Sanaa. Konflik berubah menjadi perebutan kekuasaan nasional.

2015 | SAUDI TURUN PERANG

Saudi memimpin koalisi Arab meluncurkan serangan ke Houthi. Houthi mulai menyerang wilayah perbatasan Saudi.

2017-2019 | ERA RUDAL & DRONE

Serangan Houthi menjangkau Riyadh dan fasilitas militer. 2019: fasilitas minyak Aramco diserang.

2022 | GENCATAN SENJATA

Gencatan senjata menurunkan pertempuran besar, meski konflik belum selesai.

2023 | DIALOG SAUDI-HOUTHI

Hubungan Saudi-Iran pulih. Saudi membuka dialog langsung dengan Houthi di Sanaa.

2023-2024 | MELUAS KE LAUT MERAH

Perang Gaza memicu serangan Houthi terhadap kapal di Laut Merah. AS-Inggris membalas dengan serangan ke Yaman.

JULI 2026 | GENCATAN SENJATA RUNTUH

Serangan kembali pecah setelah pemerintah Yaman menyerang Bandara Sanaa. Houthi membalas dengan rudal ke Saudi.

JULI-SEPTEMBER 2026 | ESKALASI BARU

Houthi kembali menyerang Saudi. Pertempuran di Yaman meningkat dan meluas ke wilayah pesisir Laut Merah.

OKTOBER 2026 | FASE PERANG BARU

Pasukan pemerintah yang didukung Saudi meluncurkan ofensif besar di sekitar Bab el-Mandeb dan Mocha. Houthi membalas dengan rudal dan drone ke Saudi.

7 OKTOBER | SERANGAN MELUAS

Saudi mengklaim mencegah rudal Houthi dekat Riyadh. Houthi menyerang Bandara Aden, sementara mereka juga mengklaim menargetkan Bandara Riyadh.



dalam. Reuters melaporkan Turki memberikan bantuan teknis dan pertahanan kepada Riyadh, termasuk peralatan militer, intelijen, sistem pertahanan udara, dan dukungan operasi drone. Pakistan juga telah menyatakan dukungan dalam kerangka pakta pertahanan bersama dengan Saudi dan Turki. Ketiga negara sebelumnya sepakat mengaktifkan langkah pencegahan dan memperkuat pertahanan Saudi menghadapi ancaman Houthi. (gus,rtr,afp,ist/dya)

Acha Septriasa Blackout Usai Maraton, Apa yang Terjadi pada Tubuh Pelari?

Menyelesaikan maraton sejauh 42 kilometer bukan hanya menguji daya tahan otot. Tubuh juga menghadapi kehilangan cairan dan elektrolit, peningkatan suhu, penggunaan cadangan energi, serta perubahan sirkulasi darah. Karena itu, kondisi tubuh setelah garis finis tetap perlu diperhatikan.

Aktris Acha Septriasa mengalami hal tersebut setelah menyelesaikan maraton pertamanya di Sydney, Australia. Ia mengaku sempat mengalami blackout atau kehilangan kesadaran ketika tiba di rumah. Saat itu, ia berada berdua dengan putrinya, Bridgia Kalina Kharisma.

"Kemarın pas lagi aku tinggal sama Bri berdua selesai maraton, aku ingat banget aku sempat blackout gitu," kata Acha Septriasa saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Acha menduga kondisi itu berkaitan dengan kombinasi aktivitas fisik berat, cuaca, kurang minum, dan terlambat mendapatkan asupan setelah berlari. Ia juga menyebut pengalaman tersebut merupakan kali pertamanya menempuh jarak 42 kilometer.

"Jadinya karena memang mungkin baru pertama kali lari 42 kilo. Gak tahu gitu rasanya badan mungkin ada heartstroke-nya juga, mungkin badan juga ngerasanya kurang minum dan juga gak langsung makan protein, jadinya lemah banget waktu itu. Akhirnya aku ya gitu, blackout di depan

kamar, jatuh," tuturnya.

Istilah yang digunakan Acha, heartstroke, perlu dibedakan dari heat stroke atau sengatan panas. Dari cerita tersebut saja, penyebab pingsannya tidak dapat dipastikan. Kehilangan kesadaran setelah olahraga berat dapat terjadi karena sejumlah mekanisme, mulai dari dehidrasi dan kelelahan hingga penurunan tekanan darah setelah berhenti berlari secara tiba-tiba.

Mengapa Ambruk Setelah Finis?

Fenomena pingsan atau exercise-associated collapse cukup dikenal dalam kedokteran olahraga. Mayo Clinic menjelaskan bahwa kondisi ini dapat terjadi ketika pelari berhenti setelah berlari dalam waktu lama. Saat otot berhenti berkontraksi, darah dapat lebih banyak berkumpul di tungkai sehingga tekanan darah turun dan aliran darah ke otak berkurang. Akibatnya, pelari dapat mengalami pusing, lemas hingga kehilangan kesadaran.

Namun, bukan berarti setiap pelari yang pingsan setelah maraton mengalami dehidrasi. Ada kondisi lain yang juga harus diperhatikan, termasuk hiponatremia terkait olahraga, yakni kadar natrium darah menjadi terlalu rendah. Kondisi ini dapat terjadi ketika seseorang minum air dalam jumlah berlebihan selama aktivitas panjang sehingga kadar natrium dalam darah terdilusi. Risiko tersebut dikenal pada peserta

maraton, ultramaraton, dan olahraga ketahanan lainnya. Di sisi lain, kehilangan cairan melalui keringat memang dapat menyebabkan dehidrasi. AHA mencatat gejalanya dapat berupa rasa haus, mulut kering, sakit kepala, kelelahan, pusing, hingga penurunan kesadaran pada kondisi berat.

Cuaca panas menambah beban bagi tubuh. Saat berolahraga, tubuh menghasilkan panas dan berusaha menurunkannya melalui keringat. Dalam kondisi panas dan lembap, proses pelepasan panas menjadi lebih sulit.

Bukan Hanya Soal Minum

Cerita Acha juga menyinggung asupan makanan setelah maraton. "Gak langsung makan protein," ujarnya ketika menjelaskan mengapa tubuhnya terasa sangat lemah.

Setelah olahraga ketahanan, tubuh memang membutuhkan pemulihan. Cairan dan elektrolit yang hilang perlu diganti, sementara asupan makanan membantu mengisi kembali energi dan menyediakan bahan untuk proses pemulihan otot. American Heart Association menyebut minuman yang mengandung karbohidrat dan elektrolit dapat membantu rehidrasi setelah dehidrasi akibat aktivitas berat pada

kondisi tertentu.

Meski demikian, protein bukan satu-satunya zat gizi yang dibutuhkan setelah maraton. Pelari juga membutuhkan karbohidrat untuk membantu mengembalikan cadangan glikogen yang terkuras selama aktivitas panjang. Kebutuhan setiap orang berbeda berdasarkan durasi lari, intensitas, ukuran tubuh, kondisi cuaca, dan pola latihan.

Yang juga penting adalah tidak memaksakan minum sebanyak-banyaknya. Tujuannya bukan sekadar memasukkan cairan sebanyak mungkin, melainkan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Minum berlebihan dalam olahraga jarak jauh justru dapat meningkatkan risiko hiponatremia. (far,ist/dya)



Gravitasi Matahari-Bulan Bisa Picu Gempa? Ini Kata Ilmuwan

Matahari dan Bulan bukan hanya mengatur pasang surut air laut. Gaya gravitasi keduanya juga menimbulkan perubahan tekanan yang sangat kecil pada kerak Bumi. Dalam kondisi tertentu, gangguan ini ternyata dapat memengaruhi pergerakan patahan dan memicu gempa bumi lambat.

Temuan tersebut berasal dari penelitian yang diterbitkan di Journal of Geophysical Research: Solid Earth pada 20 September 2026. Peneliti Yishuo Zhou, Ankit Gupta, Hideo Aochi dan koleganya menggunakan pemodelan fisika untuk mengkaji bagaimana tekanan pasang surut atau tidal stress dapat memengaruhi patahan yang sensitif terhadap perubahan tekanan kecil.

Namun, temuan ini tidak berarti posisi Bulan atau Matahari dapat digunakan untuk meramalkan kapan gempa besar akan terjadi. Justru, penelitian tersebut berfokus pada gempa lambat atau slow earthquakes, yakni pergeseran pada bidang patahan yang melepaskan energi jauh lebih perlahan dibandingkan gempa biasa sehingga umumnya tidak menimbulkan guncangan yang terasa di permukaan.

Gaya pasang surut terbentuk terutama akibat gravitasi Bulan dan Matahari. Pengaruhnya terhadap batuan sangat kecil, hanya beberapa kilopaskal. Besaran ini kurang lebih sebanding dengan tekanan ringan yang diberikan tangan. Meski kecil, tekanan tersebut dapat menjadi penting ketika sebuah patahan berada dalam kondisi yang sangat sensitif. Penelitian ini menunjukkan bahwa

respons patahan tidak hanya ditentukan oleh besarnya tekanan, tetapi juga oleh karakter gesekan pada bidang patahan serta periode gangguan yang diterimanya.

Para peneliti menggunakan model spring-block yang dipadukan dengan konsep rate-and-state friction. Model tersebut menggambarkan bagaimana dua permukaan yang saling bergesekan dapat merespons perubahan tekanan dan kecepatan pergeseran.

Hasil simulasi menunjukkan gangguan pasang surut yang lemah dapat menghasilkan pola pergeseran yang berbeda. Pada kondisi tertentu, patahan mengalami pergerakan perlahan. Namun, ketika amplitudo gangguan lebih besar atau periode tekanannya sesuai dengan karakter alami patahan, pergeseran dapat meningkat dan berubah menjadi peristiwa yang lebih cepat.

Kuncinya adalah resonansi. Fenomena itu dapat dianalogikan seperti mendorong ayunan. Satu dorongan kecil mungkin hampir tidak menghasilkan gerakan berarti. Namun,

jika dorongan diberikan dengan ritme yang tepat, gerakan ayunan dapat semakin besar.

Hal serupa dalam model penelitian terjadi ketika periode gangguan pasang surut mendekati skala waktu respons alami suatu patahan. Kondisi tersebut membuat patahan lebih sensitif terhadap tekanan yang sebenarnya sangat kecil.

Temuan tersebut perlu dibaca hati-hati. Pasang surut terjadi secara rutin setiap hari, tetapi gempa bumi tidak otomatis muncul setiap kali terjadi pasang maksimum.

Survei dan kajian seismologi sebelumnya juga menemukan adanya hubungan antara pasang surut dan jenis gempa tertentu. Namun, Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menegaskan bahwa pengaruh pasang surut tidak dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi gempa secara spesifik. Pasang surut Matahari dan Bulan terjadi setiap hari dan berubah secara musiman, sedangkan gempa dipengaruhi sistem tektonik yang jauh lebih kompleks.

Dengan kata lain, gravitasi Bulan dan Matahari lebih tepat dipandang

sebagai pemicu tambahan pada patahan yang sudah berada dalam kondisi tertentu, bukan sebagai penyebab utama yang menentukan kapan gempa terjadi.

Hal ini penting karena energi utama gempa berasal dari proses tektonik. Lempeng Bumi terus bergerak dan secara perlahan mengakumulasi tegangan. Ketika kondisi pada suatu patahan memungkinkan terjadinya pelepasan energi, gangguan kecil dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi waktunya.

Mengapa Gempa Lambat Penting?

Penelitian terbaru tersebut menarik perhatian pada gempa lambat karena fenomena ini dapat memberikan petunjuk mengenai apa yang terjadi di dalam zona subduksi.

Gempa lambat dapat berlangsung dalam waktu jauh lebih lama dibandingkan gempa biasa. Sebagian tidak menghasilkan guncangan yang dapat dirasakan manusia, tetapi tetap menunjukkan bahwa bidang patahan sedang mengalami pergeseran dan pelepasan tegangan.

Peneliti menemukan bahwa pola aktivitas tersebut dapat muncul pada fase pasang surut tertentu. Dalam simulasi, waktu terjadinya pergeseran dapat berkaitan dengan saat tekanan pasang surut mencapai maksimum atau ketika perubahan tekanan berlangsung paling cepat. (farist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Strategi Rawat Kulit dengan Rotasi Skincare, Jaga Skin Barrier

Mendapatkan kulit sehat, cerah, dan bebas jerawat tidak selalu berarti harus menggunakan banyak produk perawatan wajah sekaligus. Justru, pemakaian bahan aktif secara berlebihan berisiko membuat kulit mengalami iritasi, kemerahan, hingga mengganggu fungsi pelindung alaminya atau skin barrier.

Di tengah tren penggunaan berbagai produk skincare, metode skin cycling mulai banyak dilirik sebagai alternatif perawatan kulit yang lebih teratur. Teknik ini mengandalkan rotasi penggunaan bahan aktif dan waktu pemulihan kulit dalam siklus empat malam.

Metode tersebut dipopulerkan oleh dokter spesialis kulit asal New York, Amerika Serikat, dr. Whitney Bowe. Melalui pendekatan ini, pengguna tidak harus menghentikan penggunaan bahan aktif, tetapi mengatur jadwal pemakaiannya agar kulit memiliki kesempatan untuk beradaptasi dan pulih.

Malam Pertama: Eksfoliasi

Tahap pertama berfokus pada pengangkatan sel kulit mati menggunakan produk eksfoliasi kimia. Bahan yang umum digunakan antara lain AHA (Alpha Hydroxy Acid), BHA (Beta Hydroxy Acid), dan PHA (Poly Hydroxy Acid). AHA membantu mengangkat sel kulit mati di permukaan kulit.

Sementara itu, BHA, seperti asam salisilat, dikenal mampu menembus minyak di dalam pori-pori sehingga membantu mengatasi komedo dan pori-pori tersumbat. Adapun PHA memiliki karakteristik molekul yang relatif lebih besar sehingga bekerja lebih perlahan di permukaan kulit. Bahan ini kerap dipilih sebagai alternatif eksfoliasi yang lebih

lembut. Setelah menggunakan produk eksfoliasi, kulit tetap membutuhkan pelembap untuk menjaga hidrasi dan mengurangi risiko iritasi.

Malam Kedua: Retinoid

Tahap berikutnya menggunakan retinoid, kelompok turunan vitamin A yang mencakup retinol. Bahan ini dikenal dalam perawatan kulit karena membantu mempercepat pergantian sel, memperbaiki tekstur kulit, menyamarkan tanda penuaan, serta membantu menangani jerawat.

Retinoid juga berperan dalam merangsang produksi kolagen. Namun, pemakaiannya perlu dilakukan secara bertahap karena pada sebagian orang dapat menimbulkan kulit kering, kemerahan, mengelupas, dan terasa perih.

Malam Ketiga Dan Keempat: Pemulihan

Dua malam terakhir menjadi waktu istirahat dari bahan aktif yang berpotensi mengiritasi kulit. Pengguna disarankan memprioritaskan produk pelembap dan bahan yang membantu menjaga lapisan pelindung kulit. Kandungan seperti ceramide, hyaluronic acid, dan glycerin dapat menjadi pilihan untuk mempertahankan kelembapan. Pada tahap ini, penggunaan produk

eksfoliasi maupun retinoid dihentikan sementara. Setelah melewati empat malam, siklus dapat dimulai kembali dengan mempertimbangkan kondisi dan respons kulit.

Mengapa Skin Cycling Menarik?

Salah satu alasan metode ini populer adalah pendekatannya yang lebih terstruktur dalam menggunakan bahan aktif. Tidak sedikit pengguna skincare yang menggabungkan beberapa produk sekaligus dengan harapan memperoleh hasil lebih cepat.

Padahal, penggunaan eksfoliator dan retinoid secara bersamaan, terutama bagi pemula atau pemilik kulit sensitif, dapat meningkatkan risiko iritasi.

Dengan memberikan jeda, pengguna memiliki kesempatan untuk memantau respons kulit terhadap masing-masing bahan aktif. Dua malam pemulihan juga membantu mengurangi paparan berulang terhadap bahan yang berpotensi menyebabkan iritasi.

Metode ini juga dapat membantu menyederhanakan rutinitas perawatan. Alih-alih menggunakan banyak bahan aktif setiap malam, pengguna cukup mengikuti jadwal yang lebih teratur. Meski demikian, skin cycling bukan metode yang secara otomatis menghilangkan jerawat, mencegah semua efek samping retinoid, atau menjamin kulit menjadi glowing.

Hasilnya bergantung pada kondisi kulit, jenis produk, konsentrasi bahan aktif, dan konsistensi pemakaian.

Meski terlihat sederhana, metode skin cycling tidak bisa diterapkan dengan pola yang sama kepada semua orang. Pemilik kulit sensitif, kering, atau memiliki gangguan lapisan pelindung kulit perlu lebih berhati-hati. Penggunaan eksfoliator dan retinoid secara berurutan tetap berpotensi menimbulkan iritasi, meskipun sudah diselingi waktu pemulihan.

Bagi pemula, frekuensi penggunaan bahan aktif dapat disesuaikan dengan toleransi kulit. Bahkan, jika muncul sensasi terbakar, kemerahan yang menetap, atau pengelupasan berlebihan, penggunaan produk aktif sebaiknya dihentikan sementara dan kondisi kulit dievaluasi.

Orang yang sedang mengalami eksim, rosacea, atau gangguan kulit lainnya juga sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit sebelum mencoba rutinitas tersebut. Hal penting lainnya adalah penggunaan tabir surya pada pagi dan siang hari. Perlindungan terhadap sinar ultraviolet tetap diperlukan, terutama ketika menggunakan bahan aktif yang dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap paparan matahari.

Retinoid topikal juga perlu mendapat perhatian khusus. Penggunaannya tidak dianjurkan selama kehamilan. (far,ist/dya)
Lihat Klaim Secara Proporsional



Haji 2027: Rp54,6 Jutadari Hal 1

Pemerintah dan DPR menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp98.466.351 per jemaah. Meski total biaya naik lebih dari Rp11 juta dibandingkan BPIH 2026, beban Bipih yang menjadi tanggungan langsung jemaah hanya meningkat sekitar Rp455 ribu.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan BPIH 2027 terdiri atas Rp54.648.825 atau 55,50 persen yang dibayar langsung jemaah melalui Bipih dan Rp43.817.526 atau 44,50 persen yang bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

"Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa BPIH tahun 1448H/2027M per jemaah rata-rata sebesar Rp98.466.351," kata Dasco, Rabu (7/10/2026).

Besaran tersebut lebih tinggi dibandingkan BPIH 2026 sebesar Rp87.409.365. Namun, Bipih hanya bergerak dari Rp54.193.806 pada 2026 menjadi Rp54.648.825 pada 2027, atau bertambah sekitar Rp455 ribu. Perubahan itu dimungkinkan karena porsi nilai manfaat yang digunakan untuk membiayai jemaah meningkat dari 38 persen pada 2026 menjadi 44,50 persen pada 2027.

Dalam struktur biaya 2027, kebutuhan jemaah di dalam negeri dialokasikan rata-rata Rp5.643.945,28 per jemaah. Komponen pelayanan dan kebutuhan jemaah selama berada di Arab Saudi mencapai Rp54.317.360,07, sedangkan biaya penerbangan ditetapkan rata-rata Rp38.550.546 perjemaah.

Untuk layanan di Arab Saudi, pemerintah dan DPR juga menyepakati perubahan skema kontrak. Penyediaan pelayanan haji 2027 menggunakan skema tidak terpisah, dengan jemaah Indonesia menggunakan paket layanan C. Dasco mengatakan keputusan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan penyelenggaraan haji 1448 Hijriah.

"Kontrak penyediaan pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi di Arab Saudi menggunakan skema tidak terpisah. Paket layanan untuk jemaah haji tahun 1448 Hijriah selama di Arab Saudi menggunakan paket layanan C," ujarnya.

Paket layanan tersebut berkaitan dengan pelayanan jemaah selama berada di Arab Saudi dan menjadi salah satu unsur dalam struktur biaya penyelenggaraan. Sebelumnya, pemerintah menyebut perubahan

layanan di Arab Saudi sebagai salah satu faktor yang ikut memengaruhi perhitungan biaya haji 2027.

Subsidi Rp3 Juta

Meski Bipih ditetapkan Rp54.648.825, angka tersebut bukan berarti seluruh jumlah itu harus dibayarkan jemaah sekaligus pada saat pelunasan. Jemaah telah memiliki setoran awal Rp25 juta, sementara sebagian nilai manfaat dialokasikan ke rekening virtual jemaah.

Dalam rapat penetapan BPIH, Dasco juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memberikan subsidi Rp3 juta per jemaah untuk Bipih.

"Sudah berkomunikasi dengan bapak Presiden. Bapak Presiden memberikan subsidi sebesar Rp3 juta untuk bipih," kata Dasco.

Dengan skema tersebut, besaran yang akhirnya harus dilunasi jemaah menjadi lebih rendah setelah memperhitungkan setoran awal, saldo nilai manfaat pada rekening virtual, dan subsidi pemerintah. Perhitungan rinci pelunasan perlu mengikuti ketetapan teknis Kementerian Haji dan Umrah setelah BPIH ditetapkan.

Selain itu, Panja Komisi VIII DPR menyetujui sisa nilai manfaat sekitar Rp2,6 triliun untuk dialokasikan ke rekening virtual jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga agar penggunaan nilai manfaat tidak hanya berorientasi pada jemaah yang berangkat, tetapi juga memperhitungkan kepentingan jemaah yang masih menunggu keberangkatan.

Dari sisi komposisi pembiayaan, BPIH 2027 menggunakan nilai manfaat sebesar Rp43.817.526 per jemaah, dengan total nilai manfaat yang digunakan mencapai Rp8832.950.494.016,94. Besaran ini mencerminkan perubahan formula pembiayaan dibandingkan 2026, ketika porsi biaya yang ditanggung langsung jemaah masih mencapai 62 persen.

Dengan BPIH yang telah ditetapkan, tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan standar layanan, termasuk penerapan Paket C di Arab Saudi, sejalan dengan kemampuan dana haji dalam jangka panjang. BPKH sebelumnya mengingatkan kebijakan BPIH harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan haji, kepentingan jemaah yang berangkat, serta hak jemaah yang masih berada dalam masa tunggu.

Paket C haji adalah standar layanan puncak haji di Masyair (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) dari Pemerintah Arab Saudi yang disepakati untuk jemaah haji reguler Indonesia mulai musim haji 1448 H / 2027 M. Kebijakan ini diterapkan menyusul keputusan otoritas Arab Saudi yang resmi menghapus Paket D, yaitu kategori layanan kelas paling rendah dan ekonomis yang selama bertahun-tahun digunakan oleh Indonesia. Dengan hilangnya opsi tersebut, Paket C kini menjadi standar pelayanan minimum yang wajib diambil guna memberikan fasilitas yang lebih layak dan manusiawi.

Jika dibandingkan dengan Paket D yang digunakan Indonesia sebelumnya, Paket C menawarkan peningkatan kualitas fasilitas yang signifikan di kawasan Armuzna. Jemaah akan mendapatkan ruang

tenda yang lebih luas sehingga memberikan keleluasaan bergerak, sistem pendingin ruangan (AC) yang jauh lebih dingin dan nyaman, serta infrastruktur tenda yang lebih kokoh menggunakan sekat panel semen serta gips yang tahan kelembapan dan api. Seluruh aspek akomodasi, katering, dan transportasi ini juga dikelola secara terintegrasi dengan konsep fullboard melalui sistem syariah (perusahaan penyedia layanan Saudi).

Arab Saudi merampungkan rangkaian pertemuan persiapan penyelenggaraan haji 1448 Hijriah/2027 Masehi dengan kantor urusan haji (KUH) dari 78 negara. Pertemuan tersebut membahas kesiapan operasional, persyaratan, jadwal, hingga kontrak layanan sebelum jemaah tiba di Arab Saudi.(wid,rls,ant,rtr/dya)

**STANDAR BARU
ARAB SAUDI**

Zonasi Hotel

Kamar dibagi menjadi Kelas Ekonomi dan Kelas Satu. Booking Makkah-Madinah dikunci lebih awal untuk lokasi strategis.

Syarat & Prosedur

- **Istitha'ah:**
Skrining kesehatan sebelum pelunasan.
- **Biometrik:**
Wajib melalui Saudi Visa Bio.
- **Manasik:**
Ditambah menjadi 8 pertemuan.
- **Tanazul:**
Kepulangan kloter dini diatur untuk mengurangi kepadatan Mina.

Validasi Paspor

- Berlaku minimal hingga 6 November 2027.
- Wajib memiliki minimal 2 suku kata. Nama satu kata harus ditambah melalui endorsement.



dengan porsi. Porsinya sekarang sekitar rata-rata 14 tahun, 15 tahun. Mereka lah yang berangkat," kata Marwan.

Marwan juga menjelaskan skema subsidi pemerintah untuk biaya haji 2027. Subsidi sekitar Rp3 juta diberikan kepada jemaah yang masuk antrean keberangkatan, bukan seluruh jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu. Jemaah yang baru mendaftar tidak memperoleh subsidi keberangkatan, tetapi tetap mendapatkan virtual account sebagai bagian dari mekanisme daftar tunggu.(wid,ist kum/dya)

**Wamenhaj:
Masa Tunggu Faktual 14 Tahun**

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan masa tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia secara faktual kini rata-rata mencapai 14 tahun. Angka tersebut diketahui setelah Kementerian Haji dan Umrah melakukan validasi terhadap data jemaah yang masuk dalam daftar tunggu.

Dahnil menjelaskan, jemaah yang akan berangkat pada musim haji 2027 merupakan mereka yang telah mendaftar sekitar 2013, 2014, hingga 2015. Lama antrean berbeda di setiap daerah. "Yang 2027 nanti itu orang-orang yang di tahun 2014, 2013, 2015. Beda-beda setiap (provinsi). Jadi rata-rata tuh 14 tahun, faktualnya," kata Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Menurut Dahnil, angka tersebut

berbeda dari hitungan daftar tunggu sebelumnya karena pemerintah melakukan validasi terhadap data jemaah. Dari proses itu ditemukan sejumlah data yang tidak lagi valid. "Kenapa bisa faktualnya di situ? Karena selama ini banyak data-data yang invalid, tapi diisi oleh orang," ujarnya.

Ia kembali menegaskan masa tunggu faktual rata-rata 14 tahun, meski di sejumlah daerah terdapat antrean sekitar 13 tahun.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan jemaah yang berangkat pada 2027 merupakan mereka yang telah memperoleh porsi sesuai antrean di daerah masing-masing. Karena masa tunggu berbeda antarprovinsi, jemaah yang berangkat umumnya telah menunggu sekitar 13-15 tahun.

"Jemaah berangkat itu sesuai

3 BRANKAS, RESTORAN HINGGA SAHAM: JEJAK TPPU RP346 M EKS JAMPIDSUS FEBRIE

Tiga brankas, puluhan perusahaan, sebuah restoran, emas 74 kilogram, hingga saham senilai Rp14 miliar menjadi bagian dari konstruksi perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026), jaksa menyebut Febrie bersama tiga terdakwa lain menerima dan mengelola harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Nilai penerimaan yang didakwakan mencapai Rp346,74 miliar dan US\$440.990 atau sekitar Rp7,9 miliar.

Jejak itu salah satunya terlihat dari tiga brankas yang dibongkar dalam penyidikan. Di brankas Koin Money Changer di Jalan Raya, Cipete Selatan, penyidik menemukan uang dalam berbagai mata uang, antara lain US\$84.356, SGD83.404, SAR17.445, NZD100 dan VND100.000. Temuan itu menjadi bagian dari barang bukti yang kemudian diuraikan jaksa dalam surat dakwaan. Di lokasi lain, yakni Cafe De'Clan, penyidik menemukan uang tunai sekitar US\$889.965, SGD3,13 juta dan Rp259,15 juta.

Brankas di rumah Febrie di Sentul mengungkap temuan yang lebih besar. Jaksa menyebut tujuh koper menyimpan 74 batang emas dengan berat sekitar satu kilogram per batang. Selain emas, terdapat uang tunai dalam dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura.

Secara keseluruhan, penyidik sebelumnya menyebut menemukan sekitar 74 kilogram emas, US\$4,76 juta, SGD14,08 juta dan Rp100 juta dari rumah tersebut. Febrie pernah menyatakan barang-barang yang ditemukan memiliki pemilik dan berkaitan dengan kegiatan tertentu. Namun, substansi kepemilikan dan asal-usul harta itulah yang kini diuji di pengadilan.

Dakwaan kemudian membawa perkara itu ke relasi bisnis Febrie dengan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho. Jaksa menyebut keduanya telah mengenal sejak Febrie bertugas sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Timur pada 2013-2015. Keduanya disebut kerap bertemu di restoran Prancis Gontran Cherrier di Cipete.

Sekitar 2020, menurut jaksa, Febrie melalui Don Ritto alias Idon membeli restoran tersebut. Usaha itu kemudian berganti nama menjadi Cafe De'Clan di bawah PT De Clan Kuliner Nusantara. Nama restoran ini kembali muncul dalam dakwaan ketika jaksa menguraikan bagaimana uang diduga ditempatkan atau digunakan melalui sejumlah badan usaha.

Jaksa menyebut Febrie bersama Don Ritto dan Nurman Herin membangun atau menguasai sejumlah perusahaan dan yayasan.

Dalam dakwaan disebut 29 perusahaan dan yayasan, dengan bidang usaha antara lain money changer, pertambangan, konstruksi,



perdagangan, pembiayaan, pertanian dan peternakan. Menurut jaksa, perusahaan-perusahaan tersebut digunakan dalam rangka menempatkan, mengalihkan, membelanjakan atau mengubah bentuk harta yang diduga berasal dari tindak pidana.

Perkara Jiwasraya- Batu Bara

Dari jejaring bisnis tersebut, jaksa menarik aliran uang ke sejumlah perkara korupsi yang pernah ditangani Febrie. Salah satu yang terbesar adalah perkara PT Asuransi Jiwasraya.

Jaksa mendakwa Febrie bersama Ferry menerima SGD5 juta atau setidaknya setara Rp55 miliar dari pengusaha Tan Kian. Uang itu disebut diberikan melalui Ferry Yanto Hongkiriwang berkaitan dengan

penanganan perkara korupsi Jiwasraya.

Dalam dakwaan, jaksa menyatakan posisi Febrie sebagai Direktur Penyidikan maupun Jampidsus membuatnya memiliki kewenangan menentukan status hukum pihak-pihak yang perkaranya ditangani Jampidsus. Karena itu, penerimaan uang dari Tan Kian disebut berkaitan dengan upaya agar pengusaha tersebut tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Perkara Jiwasraya ini sekaligus menjadi dasar dakwaan pemerasan terhadap Febrie. Jaksa menilai penerimaan Rp55 miliar tersebut merupakan imbalan atas kewenangan Febrie dalam menentukan status hukum pihak yang tersangkut perkara.

Aliran uang lain yang menonjol berasal dari perkara pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Jaksa menyebut Febrie menerima Rp20,6 miliar dari Tria Bellitonito Aturbumi, Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada (OBP).

Uang tersebut disebut diterima dalam beberapa tahap. Dalam dakwaan, jaksa juga mengungkap penggunaan istilah "kue" untuk penerimaan yang dikaitkan dengan Cafe De'Clan. Penyebutan restoran dalam transaksi itu menjadi salah satu

bagian yang menghubungkan penerimaan uang dengan jejaring usaha yang disebut jaksa dibangun Febrie dan orang-orang dekatnya.

Selain dua aliran tersebut, jaksa menyebut penerimaan Rp60 miliar serta tanah dan/atau bangunan dari Andy Chandra Tan, pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa, dan Heri Janto, Direktur Utama PT BAS, melalui Don Ritto dan Nurman Herin dengan menggunakan PT Kresna Pusaka Energi. Tidak seluruh penerimaan dalam dakwaan berbentuk uang tunai. Jaksa juga menguraikan penerimaan saham senilai Rp14 miliar dari Michael Njoman, Direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses (CBS), melalui Ferry dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi (TMA).

Penerimaan saham itu dikaitkan dengan penyelesaian sisa kewajiban PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia. Menurut jaksa, kewajiban tersebut semula sekitar Rp76,6 miliar dan kemudian tersisa sekitar Rp57,3 miliar.

Jaksa menguraikan Michael meminta bantuan Ferry untuk mendapatkan keringanan bunga dan denda. Dalam proses tersebut, nama Febrie disebut muncul ketika persoalan pekerjaan di lingkungan Krakatau Steel dibicarakan. Jaksa menyebut Febrie meminta agar Michael "kontak Om Idon". Setelah kesepakatan mengenai penyelesaian kewajiban dibuat, Michael disebut memberikan 28 ribu lembar saham PT CBS senilai Rp14 miliar melalui PT TMA pada Maret 2025. Ferry kemudian ditempatkan sebagai komisaris CBS.

Di luar penerimaan yang disebut secara spesifik, jaksa merinci penerimaan lain yang seluruhnya mencapai Rp203,47 miliar. Sumbernya antara lain Indonesia Eximbank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Krakatau Steel, Karya Indah Alam Sejahtera, Sinarmas Asset Management, Bandung Indah Gemilang, Inti Sumber Bajasakti, PT Sinarmas Agro dan sejumlah pihak lain yang perkaranya berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi. (wid,ist,rls,ant/dya)

Brankas di rumah Sentul yang dibongkar selama pengusutan kasus Febrie Adriansyah. (Dok. Istimewa)

